



## **PIDATO**

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN ACARA PENETAPAN KESEPAKATAN BERSAMA  
TERHADAP RANCANGAN AWAL RPJMD TAHUN 2025-2029  
DAN RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APABD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024  
JUMAT, 11 JULI 2025**

***ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.***

**YTH. SDR WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN  
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. SDR PIMPINAN PT.BANK NAGARI, BUMN DAN  
BUMD  
YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,  
PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. SDR REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN  
YANG BERBAHAGIA**

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada Rapat Paripurna dengan

agenda Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2025, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. **Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala aali Sayyidina Muhammad**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini, dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim*** Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 3 Ranperda :

1. Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
2. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
3. Ranperda tentang Fasiltasi Penyelenggaraan Pesantren.

kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... ( Ketokan Palu 3 Kali ).

Sesuai dengan Tata Tertib, Rapat Paripurna untuk penetapan Ranperda dan APBD, dihadiri dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.

.....  
Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota  
.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

***Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;***

Sehubungan dengan surat Ketua Tim Pembahasan (komisi V) Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren tanggal 10 Juli 2025 kepada Pimpinan DPRD perihal penundaan Pendapat akhir fraksi terhadap ranperda tentang penyelenggaraan pesantren. maka pada rapat paripurna kali ini dalam rangka pengambilan keputusan hanya untuk 2 (dua) Ranperda.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa sebagai tindak lanjut dari penetapan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, pada rapat paripurna DPRD tanggal 27 Mei 2025 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam rangka akuntabilitas dan

transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pada rapat paripurna tanggal 13 Juni 2025, Gubernur Sumatera Barat juga telah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama dengan DPRD.

Untuk pembahasan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Pemerintah Daerah dan OPD terkait sedangkan untuk pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD.

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, Panitia Khusus bersama OPD terkait dan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD telah menyelesaikan pembahasan pembicaraan tingkat pertama terhadap Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tahun 2024 dan diakhiri pembahasan Pembicaraan Tingkat I, Fraksi-Fraksi juga telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi-nya terhadap ke 2 (dua) Ranperda tersebut dan memberikan persetujuan untuk dapat dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat kedua, yaitu Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.

Sebelum Panitia Khusus dan Badan Anggaran menyampaikan Laporan hasil pembahasannya pada rapat paripurna ini, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa catatan penting terkait dengan Ranperda RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2029, sebagai berikut :

**1. Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.**

- a. Pemerintah Provinsi wajib menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara **konsisten**

terhadap proses penyusunan dan evaluasi Ranperda RPJMD di Kabupaten/Kota. Hal ini penting agar seluruh indikator dan arah kebijakan pembangunan daerah senantiasa **terintegrasi dan selaras** dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi. DPRD ingin memastikan bahwa keberhasilan di tingkat Kabupaten/Kota merupakan keberhasilan bersama untuk Sumatera Barat.

- b. Pemerintah Provinsi wajib menjalankan, target pembangunan **tidak bisa hanya bergantung pada ketersediaan anggaran APBD**. Optimalisasi sumber pembiayaan dari APBN dan sumber-sumber sah lainnya harus menjadi strategi utama. Saat ini, dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 terdapat banyak program nasional yang diarahkan ke Sumatera Barat, ini harus dimanfaatkan secara maksimal.

- c. Kepada Badan Pendapatan Daerah, kami meminta agar terus melakukan inovasi dan kerja keras dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Kita tidak bisa hanya bergantung pada kondisi yang ada saat ini. Tanpa pendapatan yang memadai, target-target RPJMD tidak akan tercapai. Ingat bahwa Permendagri No. 5 Tahun 2025 Pasal 10 huruf c menyebutkan sanksi bisa dijatuhkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur apabila kinerja fiskal tidak memadai.
- d. Pemerintah daerah harus melakukan **evaluasi kelembagaan** secara menyeluruh terhadap seluruh OPD dilingkup pemerintah provinsi Sumatera Barat. RPJMD ini mengusung strategi, indikator, dan prioritas yang harus dicapai. OPD yang tidak memiliki kontribusi langsung terhadap target-target strategis tersebut sebaiknya **direstrukturisasi atau bahkan dilikuidasi** agar

tata kelola birokrasi menjadi lebih ramping, efisien, dan fokus.

- e. Memperhatikan ketentuan **Permendagri Nomor 2 Tahun 2025**, yang secara tegas menyatakan bahwa kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur akan dinilai berdasarkan indikator dan target yang sudah diimperatiskan oleh Pemerintah Pusat. Maka jangan sampai ada kelalaian pemerintahan daerah menjadi sebab sanksi dari pemerintah pusat kepada kepala daerah.

## **2. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.**

- a. Kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2024 belumlah maksimal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Dari sisi pendapatan, terutama PAD yang menjadi kinerja utama dalam penerimaan daerah, realisasinya jauh dari target yaitu baru sebesar 88.03 %, sehingga terdapat kekurangan penerimaan dari

PAD sebesar lebih kurang 400 milyar. Demikian juga dari sisi belanja, realisasinya juga masih rendah dimana rata-ratanya baru sebesar 92.97 % dan cukup banyak OPD yang realisasi belanjanya di bawah 92 %.

- b. Tidak tercapainya target pendapatan daerah terutama target PAD, disebabkan oleh tidak adanya dukungan data potensi pajak yang valid dan akurat serta penetapan target yang terlalu tinggi serta tidak memperhatikan realisasi penerimaan semester I tahun sebelumnya. Disamping itu kinerja OPD-OPD terkait belum maksimal, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, demikian juga inovasi dan kreativitas OPD untuk mendapatkan sumber-sumber penerimaan masih rendah.
- c. Terdapat hutang jangka pendek daerah sebesar lebih kurang Rp. 510 milyar yang harus ditutup dan dicarikan solusinya pada Perubahan APBD

Tahun 2025 yang tentu sangat memberatkan Perubahan APBD Tahun 2025.

- d. Permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada Tahun 2024 tersebut, tentu perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Daerah, agar ke depan tidak terjadi lagi.

### ***Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;***

Sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada rapat paripurna ini, Panitia Khusus akan menyampaikan hasil pembahasannya terhadap Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 dan Badan Anggaran akan menyampaikan pula Laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Untuk itu, kepada Panitia Khusus dan Badan Anggaran kami persilahkan menyampaikan laporan hasil pembahasannya secara bergantian. Untuk itu,

kepada Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus dan Sekretaris Badan Anggaran, kami persilahkan secara bergantian.

- .....
1. Laporan Pansus RPJMD
  2. Laporan Badan Anggaran terhadap PPA
- .....

Terima kasih kami sampaikan Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus dan Sekretaris DPRD yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus dan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 ?

..... (ketokan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya terhadap hasil pembahasan Ranperda dimaksud.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan konsep Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD tersebut.

.....

1. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Kesepakatan Bersama terhadap Ranperda RPJMD PPA Tahun 2025-2029.
2. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Kesepakatan Bersama terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tahun 2024.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama terhadap dua ranperda dimaksud.

Selanjutnya kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, untuk ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap konsep Keputusan DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Penandatanganan Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Pada kesempatan ini, dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud diberikan Nomor :

1. Nomor : 14/SB/2025 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
2. Nomor : 15/SB/2025 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

***Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;***

Dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, maka acara kita lanjutkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Gubernur dan DPRD.

Untuk itu, kepada Sdr. Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD, kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

.....  
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Ranperda  
RPJMD dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun  
2024

.....  
***Sdr. Wakil Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;***

Dengan telah ditanda tangannya Nota Persetujuan Bersama oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD tahun 2024, maka sesuai dengan agenda pada rapat paripurna ini, acara dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu, kepada Sdr. Wakil Gubernur kami persilahkan.

.....  
Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Wakil  
Gubernur  
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Wakil Gubernur yang telah menyampaikan Sambutan/ Pendapat Akhirnya terhadap 2 Ranperda dimaksud.

***Sdr. Wakil Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;***

Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, termasuk ranperda yang akan dievaluasi oleh

Kemendagri, sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Dalam Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ditegaskan, bahwa Ranperda yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dievaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi batasan waktu penyampaiannya kepada Menteri Dalam Negeri, agar Ranperda yang telah disepakati, dapat segera dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

***Hadirin Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;***

Dengan telah ditetapkannya Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhir kata dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilamin*, Rapat Paripurna DPRD, dengan agenda Penetapan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 pada hari ini, secara resmi kami tutup.

..... ( ketok Palu 3 kali)

*Terima kasih*  
*Billahitaufiq walhidayah*  
*Wassalam'mualikum wr.wb*